



DINAMIKA KEBIJAKAN ENERGI MINYAK BUMI AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH PADA MASA BUSH HINGGA OBAMA (2001-2016)

Mei Rinta Sukma Firdaus¹

¹Total War Strategy, Republic of Indonesia Defense University
mayrinnta@gmail.com¹

Afrizal Hendra²

²Total War Strategy, Republic of Indonesia Defense University
ljal_91@yahoo.com²

Muhammad Hadiano Wirajuda³

³Total War Strategy, Republic of Indonesia Defense University
hadiano.muhammad08@gmail.com³

ABSTRAK

Timur Tengah telah lama menjadi pusat dari pusaran konflik. Salah satunya adalah yang diakibatkan oleh perebutan sumber daya energi seperti minyak bumi. Di dalamnya, terdapat kepentingan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia yang masing-masing memiliki cadangan minyak dalam sumur-sumur minyak. Ada fenomena yang kemudian dikenal sebagai peak oil, yang mana ketika harga minyak melambung tinggi akibat kelangkaan, bagaimanapun alasannya negara-negara yang terkait akan berperang dan konflik akan segera timbul. Hal ini berlaku dalam Timur Tengah yang selalu bergejolak atas berbagai kepentingan negara luar dalam aspek keamanan energinya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Franklin D. Roosevelt pada salah seorang duta besar Inggris: "Persian oil ... is yours. We share the oil of Iraq and Kuwait. As for Saudi Arabian oil, it's ours". Ini menandakan bahwa AS tidak akan lepas tangan dari Timur Tengah begitu saja, di teluk Persia disiagakanlah Armada ke-5 Angkatan Laut AS untuk mengamankan sumber-sumber minyak dan gas yang dikuasai AS sebagai pemenuhan kebutuhan energi fosil yang akan terus meningkat dari masa ke masa. Sampai saat ini geopolitik kawasan Timur Tengah tidak dapat jauh dari pengaruh minyak bumi terhadap konstelasi hubungan antarnegara Timur Tengah dengan superpower dunia. AS sebagai hegemoni yang telah lama menguasai kawasan memiliki beragam strategi untuk mempertahankan sumber-sumbernya agar tidak jatuh di tangan kekuatan lainnya. Yang terjadi saat ini adalah AS mempertahankan sumber-sumbernya dari tangan ISIS, yang dipandang sebagai ancaman besar atas yang dimiliki di Irak dan Suriah. Ancaman yang tampak nyata sehingga AS harus turun tangan untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan aktor semistate.

Kata-kunci: Timur Tengah, Amerika Serikat, minyak bumi, Perang Teluk, energi, peak oil.

THE DYNAMICS OF UNITED STATES PETROLEUM ENERGY POLICY IN THE MIDDLE EAST DURING THE BUSH TO OBAMA PERIOD (2001-2016)

ABSTRACT

Middle East has long been a center of the vortex of conflict. One is caused by competition over energy resources such as petroleum. In it, there are the interests of big countries like the United States, China, and Russia, each of which has oil reserves in oil wells. There is a phenomenon that became known as peak oil, which when oil prices soared due to scarcity, however, the reason countries related to war and conflict would soon arise. This is true in the Middle East is always turbulent over a wide range of interests outside the country in the aspects of energy security. As has been said by Franklin D. Roosevelt in one of the British ambassador: "Persian oil ... is yours. We share the oil of Iraq and Kuwait. As for Saudi Arabian oil, it's ours" . This indicates that the US will not escape the hands of Middle East just like that, in the Persian Gulf disiagakanlah 5th Fleet US Navy to secure sources of oil and gas are controlled by the US as the fulfillment of fossil energy will continue to increase over time. Until now, the geopolitical Middle East region can not be far from the influence of petroleum towards the constellation of the Middle East interstate relations with the world superpower. The US as the hegemony that has long dominated the area has a variety of strategies to maintain sources that do not fall in the hands of other forces. What happens when the US is maintaining its sources from the hands of ISIS, which is seen as a major threat on held in Iraq and Syria. The threat is obvious that the US had to intervene to quell the uprising semistate actors.

Keywords: Middle East, United States, petroleum, the Gulf War, energy, peak oil.

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan sebuah negara akan sumber daya alam dan berkaitan dengan energi sebagaimana fungsinya sebagai bahan bakar, minyak bumi merupakan bagian integral dari sebuah sistem negara yang mengedepankan ketahanan dan kedaulatan energi sebagai satu aspek penting yang perlu diperhatikan sebagai komponen utama dalam keamanan sebuah negara dalam menghadapi ancaman global di masa mendatang sebagaimana situasi geopolitik di berbagai kawasan di dunia mengalami dinamika. Timur Tengah dikenal sebagai kawasan yang menjadi penghasil minyak. Salah satunya yang dikenal adalah negara Irak. Irak secara sumber daya alam, memiliki cadangan energi berupa bahan bakar minyak dari minyak mentah berlimpah. Namun kekayaan Irak tersebut tidak dibarengi dengan kemampuan untuk mengolah minyak tersebut. Dengan demikian, berbagai konflik yang memiliki kepentingan memperebutkan sumber-

sumber minyak pada level internal menyebabkan minimnya sumber daya alam tersebut untuk dimanfaatkan dan dikelola secara mandiri oleh negara Islam besar seperti Irak (Al-Khatteeb, 2013). Selain minimnya teknologi dalam pengolahan, rendahnya kemauan negara untuk memegang kendali sumber energi menjadi faktor lainnya yang signifikan. Setidaknya ada pemain-pemain besar dalam memperebutkan sumber energi di Timur Tengah. Aktor-aktor tersebut adalah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Namun penjelasan penulis akan mengarah kepada Amerika Serikat (AS) sebagai negara adidaya yang masih belum dapat dikalahkan pengaruhnya di Timur Tengah.

2. LANDASAN TEORI ATAU TINJAUAN PUSTAKA

Amerika Serikat merupakan negara konsumen minyak bumi terbesar di dunia. Pada tahun 2023, Amerika Serikat mengimpor sekitar 70% kebutuhan minyak buminya dari luar

negeri, dengan Timur Tengah menjadi sumber impor terbesarnya. Hal ini menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan yang sangat penting bagi keamanan energi Amerika Serikat.

Pada periode 2001-2016, Amerika Serikat mengalami dua periode pemerintahan, yaitu masa pemerintahan Presiden George W. Bush (2001-2009) dan masa pemerintahan Presiden Barack Obama (2009-2016). Kedua periode pemerintahan tersebut memiliki dinamika kebijakan energi minyak bumi yang berbeda di Timur Tengah.

2.1 Masa Pemerintahan George W. Bush

Pada masa pemerintahan George W. Bush, kebijakan energi minyak bumi Amerika Serikat di Timur Tengah difokuskan pada dua hal utama, yaitu:

a. Keamanan energi: Amerika Serikat berusaha untuk mengamankan pasokan minyak bumi dari Timur Tengah dengan cara meningkatkan hubungan dengan negara-negara produsen minyak di kawasan tersebut, serta melakukan intervensi militer di Irak dan Afghanistan.

b. Mencegah penyebaran terorisme: Amerika Serikat berpendapat bahwa terorisme dipicu oleh kemiskinan dan ketidakstabilan di Timur Tengah. Oleh karena itu, Amerika Serikat berusaha untuk meningkatkan stabilitas di kawasan tersebut melalui kebijakan politik dan ekonomi.

Kebijakan keamanan energi Amerika Serikat pada masa pemerintahan Bush diwujudkan melalui berbagai langkah, seperti Meningkatkan hubungan dengan negara-negara produsen minyak di Timur Tengah: Amerika Serikat memperkuat hubungan dengan negara-negara produsen minyak di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa Amerika Serikat akan tetap mendapatkan pasokan minyak bumi yang stabil dari kawasan tersebut.

Melakukan intervensi militer di Irak dan Afghanistan. Amerika Serikat melakukan intervensi militer di Irak dan Afghanistan dengan alasan untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein dan Taliban, serta untuk memerangi terorisme. Intervensi militer ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas di kawasan Timur Tengah, sehingga pasokan minyak bumi dari kawasan tersebut dapat lebih terjamin.

Kebijakan pencegahan penyebaran terorisme Amerika Serikat pada masa pemerintahan Bush diwujudkan melalui berbagai langkah, seperti: Meningkatkan bantuan ekonomi dan militer kepada negara-negara Arab di Timur Tengah. Amerika Serikat meningkatkan bantuan ekonomi dan militer kepada negara-negara Arab di Timur Tengah, seperti Yordania, Mesir, dan Lebanon. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat negara-negara Arab tersebut dalam menghadapi ancaman terorisme.

Melakukan intervensi militer di Afghanistan. Amerika Serikat melakukan intervensi militer di Afghanistan dengan alasan untuk menggulingkan rezim Taliban, yang dianggap sebagai pendukung terorisme. Intervensi militer ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas di Afghanistan, sehingga terorisme dapat ditekan.

2.2 Masa Pemerintahan Barack Obama

Pada masa pemerintahan Barack Obama, kebijakan energi minyak bumi Amerika Serikat di Timur Tengah mengalami perubahan. Obama menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi Amerika Serikat, sehingga tidak terlalu bergantung pada Timur Tengah. Selain itu, Obama juga menekankan pentingnya kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah untuk mengatasi masalah-masalah regional, seperti terorisme dan perubahan iklim.

Kebijakan diversifikasi sumber energi Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama diwujudkan melalui berbagai langkah, seperti:

a. Meningkatkan produksi minyak dan gas domestik: Amerika Serikat meningkatkan produksi minyak dan gas domestik melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian insentif kepada perusahaan minyak dan gas, serta peningkatan investasi di bidang energi baru dan terbarukan.

b. Meningkatkan kerja sama dengan negara-negara produsen minyak di luar Timur Tengah: Amerika Serikat meningkatkan kerja sama dengan negara-negara produsen minyak di luar Timur Tengah, seperti Kanada, Brasil, dan Meksiko. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Amerika Serikat terhadap minyak bumi dari Timur Tengah.

Kebijakan diversifikasi sumber energi Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama diwujudkan melalui berbagai langkah, seperti:

a. Meningkatkan produksi minyak dan gas domestik: Amerika Serikat meningkatkan produksi minyak dan gas domestik melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian insentif kepada perusahaan minyak dan gas, serta peningkatan investasi di bidang energi baru dan terbarukan.

b. Meningkatkan kerja sama dengan negara-negara produsen minyak di luar Timur Tengah: Amerika Serikat meningkatkan kerja sama dengan negara-negara produsen minyak di luar Timur Tengah, seperti Kanada, Brasil, dan Meksiko. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Amerika Serikat terhadap minyak bumi dari Timur Tengah.

Dinamika kebijakan energi minyak bumi Amerika Serikat di Timur Tengah pada masa Bush hingga Obama menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan terus berusaha untuk mengamankan pasokan minyak buminya dari kawasan tersebut. Namun, pada masa pemerintahan Obama, Amerika Serikat mulai menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi, serta kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah untuk mengatasi masalah-masalah regional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan dan menyelidiki tentang dinamika kebijakan energi minyak bumi Amerika Serikat di timur tengah pada masa bush hingga obama (2001-2016). Metode kualitatif adalah metode yang melibatkan analisis dan interpretasi teks serta wawancara, studi pustaka dan observasi untuk menemukan pola deskriptif yang bermakna dari fenomena tertentu. Namun Peneliti akan menggunakan studi pustaka dalam mengumpulkan data terkait topik permasalahan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Amerika Serikat sebagai negara adikuasa di dunia memiliki beragam kepentingan yang dapat ditelisik satu persatu. Berkenaan dengan kepentingannya, kebijakan AS yang menjadi salah satu yang terpenting adalah mengamankan sumber energi di seluruh dunia. Alasan utama dari kebijakan ini adalah pemenuhan kebutuhan AS, utamanya untuk bahan bakar fosil yakni minyak bumi dan segala hasil penyulingannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Méritet & Salaün, AS memiliki alasan mendasar mengapa kegiatan eksplorasi minyaknya dilancarkan ke sejumlah kawasan strategis di dunia (Méritet & Salaün, 2009). Amerika Serikat mendapatkan 70 persen lebih energi per kapita atau per dolar dari GDP dibandingkan rata-rata yang dimiliki negara-negara maju. Amerika Serikat mewakili 5% populasi dunia dan menyumbangkan 25 % konsumsi energi dunia. Kawasan yang menjadi konsentrasi Amerika Serikat adalah Timur Tengah. Timur Tengah dipandang oleh AS sebagai kawasan yang mana terhampar lahan-lahan minyak subur. AS mayoritas mendapatkan pasokan minyak buminya dari jazirah Arab ini. Untuk itu AS tak segan-segan untuk menaruh bagian dari pasukannya untuk mengamankan kepentingan terbesar dalam persaingan program eksplorasi 'emas hitam' ini (Méritet &

Salaün, 2009). Hal ini yang lalu disebut oleh kalangan penstudi energi sebagai militerisasi energi. Namun sebelum membahas militerisasi energi, menurut Jentleson (2012) ada tiga cara utama AS dalam menanamkan pengaruhnya di Timur Tengah. Yang pertama adalah berperan aktif terhadap publik Timur Tengah, tidak hanya rezim yang berkuasa dan memprioritaskan reformasi demokrasi lebih kepada stabilitas rezim belaka. Yang kedua yakni menyusun strategi untuk mendorong dunia Islam untuk aktif dalam dunia perpolitikan dengan mencocokkan pada nilai-nilai Barat. Dengan demikian AS melarang partai Islam yang mendukung kekerasan dan ekstremis. Yang terakhir adalah dukungan reformasi sosial dan ekonomi yang inklusif. Kurangnya prospek karier dan lapangan pekerjaan untuk pemuda Arab adalah salah satu faktor pendorong radikalisme, seperti penolakan dari pendidikan dan hak-hak perempuan. Keringanan utang dan investasi di negara Arab sangat penting, dan untuk sementara waktu Amerika Serikat harus mengorbankan upaya untuk memaksakan aturan ekonomi yang meningkatkan kemiskinan (Jentleson et al., 2012).

Faktor lain yang menyebabkan Amerika Serikat bergelut dengan minyak adalah doktrin Mahan pada tahun 1901 yang mengubah sudut pandang Amerika Serikat yang mulanya isolasionis kemudian beranjak menuju negara yang memiliki *blue water navy*. Dengan demikian hampir di seluruh dunia laut lepas yang kemudian 'dikuasai' oleh AS yang menandakan keberadaan Angkatan Laut AS di setiap situasi dan kondisi siap untuk mengamankan kepentingan Amerika Serikat. Akibatnya, di kawasan Timur Tengah Amerika Serikat menjalin "hubungan khusus" dengan Arab Saudi. Kerajaan ini produsen minyak paling penting di Timur Tengah; juga menjadi satu-satunya negara di dunia dengan kapasitas produksi berlebih yang signifikan, yang mengizinkan, dalam krisis, untuk mengimbangi kerugian

besar dari pasokan di tempat lain di dunia (Barnes & Bowen, 2015).

Sedangkan militerisasi energi minyak sudah sejak lama berlangsung, tepatnya pada tahun 1973 di kawasan Timur Tengah. Kebutuhan akan minyak yang kemudian digunakan oleh negara-negara di Timur Tengah sebagai alat (Moran & Russell, 2009). Pada masa itu terjadi sebuah peristiwa yang mana Amerika Serikat telah meletakkan pangkalan-pangkalan militernya di sekitar kawasan Arab Saudi, hanya setelah Presiden Nixon berbincang dengan Faisal bin Abdulaziz Al Saud. Di saat yang sama pecahlah perang Yom Kippur antara Israel dengan Suriah, dengan kepentingan yang sama: memperebutkan cadangan minyak bumi di kawasan perbatasan. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya permintaan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ini atas kebutuhan minyak suatu negara. Dukungan AS terhadap Israel pada perang Yom Kippur dengan Mesir dan Suriah atas prakarsa Presiden Suriah Hafez Al-Assad dan Presiden Mesir Anwar Sadat. Tentu saja pertanyaan yang kemudian disoroti adalah bagaimana negara dapat mengamankan akses-akses terhadap sumber daya untuk tidak dijamah pihak yang berseberangan dan memanfaatkan negara yang memiliki aliansi dan mitra menguntungkan agar bersama-sama mempertahankan sumber-sumber minyak.

Kasus militerisasi lainnya terjadi seputar serangan Irak terhadap Kuwait, yang terjadi dalam konteks energi (Rahim, dalam Moran dan Russell, 2009). Saddam Husein sebagai pemerintah Irak menuding Kuwait OPEC yang terlalu banyak menyuplai pasokan minyak yang seharusnya disalurkan ke Irak. Ini menyebabkan pemasukan finansial Irak dari minyak berkurang akibat dari aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh Kuwait melanggar teritorial yang dimiliki Irak. Adanya usaha Irak untuk menggulingkan pemerintahan Kuwait diimplikasikan dalam kebijakan yaitu dengan cara membombardir hanguskan sumur minyak yang ada di Kuwait,

sehingga negara lain seperti Amerika Serikat tidak bisa memanfaatkan minyak yang ada di Kuwait (Rahim, dalam Moran dan Russell, 2009). Hal ini memicu kemarahan AS yang kemudian mengancam Irak dengan serangkaian tuduhan atas rezim diktator autokrasi yang dipimpin oleh seorang Hussein tidak kapabel dalam menjalankan roda pemerintahan, utamanya dalam sektor energi minyak bumi. Kesempatan baik AS untuk menginvasi Irak ini digunakan pada tahun 2003, AS menyerang bertubi-tubi salah satu negara yang memiliki populasi Syiah terbesar di dunia setelah Iran tersebut. Untuk kedua kalinya, Irak tersulut dalam permasalahan besar pasca perangnya dengan Republik Islam Iran pada tahun 70-an.

AS memainkan isu-isu seperti perang melawan teroris dan demokratisasi sebagai ekses untuk melakukan penetrasi pada sumber-sumber minyak. Menurut Moran dan Russell Al-Qaeda melalui pemimpinnya yakni Osama bin Laden pernah menyatakan bahwa adanya serangan teroris berbanding lurus dengan adanya pendudukan militer oleh Barat di berbagai sumber energi di Timur Tengah. Menurutnya negara Barat telah mencuri sumber minyak milik Muslim dan dianggap sebagai ancaman terhadap negara-negara Teluk Persia (Moran & Russell, 2009). Opini Laden bukan tanpa dasar, buktinya sumber energi di Afghanistan pun tidak luput dari pengendalian AS. Pasca terbunuhnya Laden, AS dengan mudahnya menguasai minyak negara tersebut dengan melakukan pembangunan pipa gas sepanjang 1000 mil yang diinisiasi oleh perusahaan minyak Unocal untuk disalurkan menuju Pakistan, dan berhulu di Turkmenistan. Proyek raksasa ini menghasilkan setidaknya satu juta barel gas setiap harinya. Di kemudian hari kebijakan AS untuk mengamankan cadangan gas ini disebut oleh media sebagai *the pipeline war* (BBC News, 2001). Perang ini merupakan salah satu dari bagian militerisasi energi yang dicanangkan AS.

Isu yang kedua untuk dibahas adalah demokratisasi, yang mana diawali dari sebuah teori yang menyatakan bahwa jika ada sebuah negara yang kaya dengan sumber minyak maka sistem yang berjalan dalam negara tersebut tidak dapat menjadi demokratis (Ross, 2001). Seperti yang dialami oleh Arab Saudi dan Brunai Darussalam yang akhirnya memilih sistem monarki sebagai jalan terbaik untuk mengelola negara sebesar itu, anggapan ini juga mendasari mengapa negara-negara penghasil minyak adalah 'rente' yang dapat dikatakan 'kaya mendadak' (Ross, 2001). Untuk itu agenda dalam menaikkan pemilihan umum sebagai solusi atas eskalasi konflik internasional yang pada masa itu menyerang jati diri Muslim dunia dengan terjadinya peristiwa 9/11. Hal ini yang kemudian memicu Amerika Serikat untuk mendorong Arab Saudi untuk menjalankan demokrasi sebagai satu patokan utama bagi negara-negara liberal yang mendukung kebebasan. Sedangkan dari nilai moral Arab Saudi, yang tertera dalam hukum syariah dicatatkan bahwa tidak ada satu pun yang mencantumkan terbentuknya dewan perwakilan yang menjadi representasi kelompok/golongan-golongan tertentu dalam negara Arab Saudi sebagai satu negara yang berdaulat (Lacroix, 2004). Kerangka demokratisasi yang disusun Amerika Serikat untuk Arab Saudi adalah salah satu upaya untuk melakukan deradikalisasi pada kawasan Timur Tengah, yang mana dikenal golongan wahabisme yang dapat memicu pemikiran garis keras yang cenderung koersif dan dapat menyerang kepentingan Amerika Serikat untuk melawan terorisme (Vogl, n.d.).

Ada yang berbeda jika membandingkan kebijakan luar negeri yang diambil oleh dua pemimpin yang memimpin masing-masing selama dua periode. Yakni pada tahun 2001 hingga 2008, dan dari 2008 hingga 2016. Adalah George Walker Bush dan Barack Obama yang memiliki pendirian berbeda mengenai cara memperlakukan Timur

Tengah. Meskipun tetap tidak menghilangkan Timur Tengah dari lingkaran konsentrasi kepentingan AS dalam percaturan politik dunia, AS menggunakan pendekatan yang berbeda pada dua zaman pemimpin yang berbeda. George W. Bush misalnya, yang terkenal dengan kebijakan perang melawan terorismenya lebih condong pada aksi militeristik. Ditunjukkan dengan perang-perang yang dilancarkan oleh Amerika Serikat pada era kepemimpinannya. Perang Irak dan Perang di Afghanistan menunjukkan bahwa pada masa kepemimpinan Bush condong terhadap penggunaan sikap koersif militer untuk mengejar kepentingan AS pada kebutuhan minyaknya. Sebaliknya, Obama yang berlatar belakang partai yang berbeda, Demokrat, menggunakan metode yang lebih halus untuk menekan Timur Tengah demi menjaga stabilitas pasokan minyak dari negara-negara teluk tersebut ke Amerika Serikat. Bukti lain yang lebih konkret adalah ditariknya prajurit AS dari kawasan Timur Tengah secara perlahan-lahan sejak tahun 2010 saat dirinya baru dua tahun menjabat sebagai Presiden AS. Hingga akhirnya tentara AS benar-benar sirna dari daratan Timur Tengah pada tahun 2011 (McGreal, 2011; Voice of America, 2011). Perbedaan kebijakan kedua presiden ini dipandang sebagai satu kontradiksi yang tidak bisa dibantah antara aliran partai politik pendukung di belakangnya. Kontradiksi ini sebaliknya dipandang oleh publik AS sebagai kemajuan yang dibuat oleh AS untuk mempromosikan hak asasi manusia dan perdamaian ke seluruh dunia, khususnya ke Timur Tengah yang dikenal sebagai titik pusran konflik dunia oleh perebutan sumber daya minyak.

Pada 2006, 39% konsumsi energi AS adalah minyak bumi, diikuti 23% yakni dari gas alam, 23 persen batu bara, 8 persen dari energi nuklir, dan 7 persen dari energi terbarukan (mayoritas berasal dari PLTA) (Méritet & Salaün, 2009). Hal ini dapat diartikan sebagai ‘kerakusan’ AS dalam hal kontestasi perebutan sumber minyak

dan gas dunia. Keamanan energi AS diuji dalam serangkaian pertempuran yang terjadi pada kawasan konflikual tersebut. Perang Irak dan Kuwait yang pernah berkecamuk menjadi beberapa dari contoh sukses mengapa Amerika Serikat selalu terlibat dalam perebutan energi pada kawasan ini. Kawasan Timur Tengah lagi-lagi menjadi sumber Amerika Serikat dalam memperoleh minyak mentah ‘masam’ (Richter, 2014). Kotoran berupa sulfur atau belerang perlu dihilangkan sebelum minyak mentah berkualitas rendah ini dapat disempurnakan melalui proses destilasi menjadi bensin, sehingga secara langsung dapat meningkatkan biaya pengolahan yang semulanya hanya tinggal menyuling saja. Hal ini menghasilkan bensin lebih tinggi dari yang terbuat dari minyak mentah ‘manis’, baik dari segi kualitas maupun harga pasaran.

Tabel 1. Jumlah impor dan ekspor migas Amerika Serikat dari berbagai kawasan dunia

Top sources and amounts of U.S. petroleum imports (percent share of total), respective exports, and net imports, 2015 million barrels per day			
Import sources	Gross imports	Exports	Net imports
Total, all countries	9.45	4.74	4.71
OPEC countries	2.89 (31%)	0.24	2.65
Persian Gulf countries	1.51 (16%)	0.02	1.49
Top five countries ¹			
Canada	3.76 (40%)	0.96	2.81
Saudi Arabia	1.06 (11%)	0.00	1.06
Venezuela	0.83 (9%)	0.07	0.75
Mexico	0.76 (8%)	0.69	0.07
Colombia	0.40 (4%)	0.17	0.22

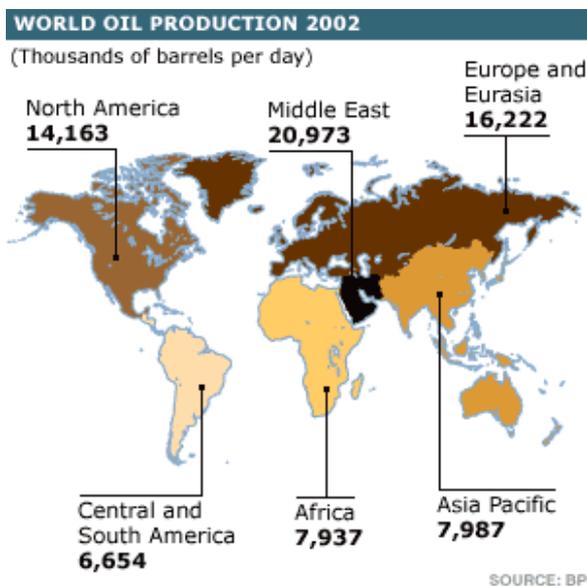
¹ Based on gross imports by country of origin.

(Sumber: EIA.GOV, 2016)

Kendati Amerika Serikat telah melahirkan nuklir sebagai sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan hemat dari segi penggunaannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa minyak bumi adalah sumber energi yang terhitung ramah dalam penggunaan dana baik dari segi eksplorasi hingga eksploitasi. Yang perlu dicermati selanjutnya adalah di mana saja Amerika Serikat mendapatkan sumber-sumber minyak tersebut. Dari data yang dimiliki EIA, tampak jelas Amerika Serikat

mendapatkan sumber impor minyak (dan gas) dari negara-negara OPEC dan teluk Persia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tabel yang tersedia di atas. Signifikansi ini ditunjukkan dengan hadirnya Arab Saudi sebagai negara kedua yang menjadi rujukan AS sebagai sumber mendapatkan sumber daya minyak yang berlimpah. Timur Tengah dalam kaca mata geopolitik dunia dianggap sebagai sebuah magnet yang memiliki daya tarik bagi siapa saja yang ingin bermain dalam kebutuhan energi dunia. Sebagaimana telah ditunjukkan pada grafik 1, Timur Tengah masih mendominasi pasokan minyak dunia dengan cadangan minyak mewakili 50 persen dunia dan sekitar 25 persen dari produksi minyak global (Barnes & Bowen, 2015). Peran negara-negara Timur Tengah, baik yang merupakan anggota OPEC maupun bukan turut menentukan masa depan dari harga minyak dunia. OPEC telah menerakan seperangkat standar aturan untuk dipatuhi negara-negara anggota dan meminimalkan kehadiran kartel atau makelar yang sering mengguncang negara-negara eksportir dan produsen. Untuk itu AS selalu berhati-hati dalam melakukan perundingan dengan negara-negara anggota OPEC.

Grafik 1. Produksi Minyak Dunia pada Tahun 2002; Tampak Timur Tengah menyumbang produksi terbanyak dunia



(Sumber: BBC News, 2002)

14 negara yang tergabung dalam OPEC membuat kesepakatan bersama terkait harga minyak bumi, yang bisa saja dimainkan oleh kepentingan negara-negara adikuasa seperti AS dan Tiongkok yang saat ini menguasai pasar petroleum dunia. Namun beberapa keputusan penting yang dibuat OPEC memicu serangkaian intervensi dari negara-negara adikuasa yang memiliki kepentingan untuk secara simultan mengubah harga minyak dunia. Tentu yang kemudian dihindarkan adalah peristiwa *peak oil* yang dapat merugikan negara-negara baik eksportir maupun importir.

Terlepas dari peran OPEC sebagai stabilisator harga, saat ini muncul keraguan bagi negara Timur Tengah terkait posisi Amerika Serikat yang menjadi penentu harga dan pasokan minyak dunia yang disebabkan oleh tiga faktor: (1) Terdapat keinginan untuk terbebas terkait kontrol atas minyak yang merupakan Sumber Daya Alam negaranya. Persediaan persenjataan yang dimiliki dinilai telah cukup untuk mempertahankan diri. (2) Kerja sama yang terjalin antara negara Teluk dan Amerika Serikat memicu konflik dengan jaringan terorisme Al-Qaeda sehingga justru menimbulkan ancaman baru dan (3) Terdapat banyak negara besar lain yang bersedia kerja sama minyak meski nantinya tak lagi kerja sama dengan Amerika Serikat seperti Tiongkok yang kini bahkan memiliki perkembangan ekonomi yang pesat (Moran & Russell, 2009).

5. PENUTUP

Dari penjelasan yang telah disebutkan penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat sebagai negara adidaya memiliki kepentingan untuk melakukan eksplorasi hingga eksploitasi sumber daya minyak yang dimiliki di Timur Tengah. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, Timur Tengah masih merupakan kawasan yang menjadi pemasok terbesar kebutuhan minyak dan gas dunia. Sedangkan Amerika Serikat yang populasinya mencapai 5% dari dunia, setidaknya

membutuhkan 25% dari total kebutuhan energi dunia. Hal ini menjadi alasan mendasar mengapa AS hingga saat ini terlibat dalam berbagai perebutan sumber energi yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Yang perlu dicermati adalah respons negara-negara yang ada di Timur Tengah dalam menanggapi aksi AS. Terkadang AS menggunakan metode *soft diplomacy*, meskipun sisanya diselesaikan melalui cara perang akibat dari instabilitas harga minyak yang ditimbulkan oleh 'ulah' negara-negara Timur Tengah yang dianggap mengacaukan fluktuasi harga menjadi labil. Dari sekian banyak pendekatan Amerika Serikat terhadap Timur Tengah, pendekatan demokratisasi dan juga militerisasi sumber daya minyak merupakan dua kebijakan yang disoroti oleh publik. Ada dua pemimpin berbeda yang menggunakan kebijakan yang berbeda, yakni George W. Bush dan Barack Obama sesuai dengan latar belakang partai politik yang ada di baliknya. Partai Republik yang cenderung konservatif cenderung untuk mengambil sikap koersif dan *all-out* terutama jika AS mendapatkan 'ancaman' dari segi mana pun. Sedangkan Obama dan Partai Demokratnya mengusung liberal dan mempromosikan nilai-nilai yang lebih *soft*.

Kendati Amerika Serikat hendak mengurangi ketergantungannya terhadap minyak teluk (Jentleson et al., 2012), namun peran sumber minyak bumi terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk terus melakukan *containment* agar tidak direbut oleh negara besar lainnya menjadi salah satu fokus Amerika Serikat dalam mengamankan akses energi. Menurut opini penulis, ke depannya Amerika Serikat memiliki peluang untuk terus menguasai minyak di Timur Tengah melalui pendekatan-pendekatan *soft* seperti demokratisasi dan sentuhan reformasi sosial ekonomi negara-negara yang menjadi tempat eksploitasi. Selain itu upaya untuk militerisasi demi tercapainya target pemenuhan sumber minyak masih menjadi cara klasik Amerika Serikat untuk mencapai *energy*

security sebagaimana diungkapkan oleh ilmuwan-ilmuwan energi yang berpengaruh dalam kebijakan eksplorasi energi di dunia. Oleh karena itu, ada aspek-aspek penting yang dikejar Amerika Serikat dari sumber-sumber minyak bumi di Timur Tengah. Impor oli dipandang Amerika Serikat sebagai stimulus dalam pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dikatakan oleh Barnes & Bowen (Barnes & Bowen, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatteeb, Luay J. (2013). "Natural Gas in The Republic of Iraq", dalam Harvard University's Belfer Center and Rice University's Baker Institute Center for Energy Studies [Online]. Tersedia dalam: http://www.gulfinthemedial.com/files/article_en/675702.pdf.
- Barnes, Joe & Andrew Bowen. (2015). "Going Back to Basics: U.S. Interests in the Region" dalam *Rethinking U.S. Strategy in the Middle East*. James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University and the Center for the National Interest.
- BBC News. (2001). "Afghanistan: the pipeline war?" dalam South Asia. 29 October, 2001, [Online]. Tersedia dalam: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1626889.stm.
- BBC News. (2002). World Oil Production. [Online]. Tersedia dalam: http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/pop_ups/04/world_the_worlds_oil/html/3.stm.
- EIA. (2015). "How much petroleum does the United States import and export?". [Online]. Tersedia dalam <http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=727&t=6>.
- Jentleson, Bruce W., Andrew M. Exum, Melissa G. Dalton and J. Dana Stuster. (2012). "Strategic Adaptation: Toward a New U.S.

- Strategy in the Middle East,” Center for a New American Security, June 2012, [Online]. Tersedia dalam: <http://www.cnas.org/strategicaadaptation>.
- Lacroix, Stéphane. (2004). Between Islamist and Liberals: Saudi-Arabia’s New “Islam Liberal” Reformists in Middle East Journal, Vol.58, No.3 (Summer 2004),
- McGreal, Chris. (2011). "Barack Obama declares Iraq war a success". The Guardian. Guardian News and Media Limited. [Online]. Tersedia dalam: <http://www.theguardian.com/world/2011/dec/14/barack-obama-iraq-war-success>.
- Méritet, Sophie and Fabienne Salaün. (2009). “The United States Energy Policy: At a Turning Point”, dalam Chevalier, Jean-Marie. (ed.) *The New Energy Crisis: Climate, Economics and Geopolitics*. Bakingstoke: Palgrave Macmillan. Pp. 173-201.
- Moran, Daniel & James A. Russell. (2009). “Introduction: The militarization of energy security”, dalam Energy Security and Global Politics: The militarization of resource management. London & New York: Routledge. Hal. 1-18.
- Richter, Burton. (2014). “Fossil Fuels – How Much Is There?” dalam Beyond Smoke and Mirrors.
- Ross, L. Michael. (2001). “Does Oil hinder Democracy?” dalam *World Politics*, Vol.53, No.3 (April 2001), Cambridge: Cambridge University Press 2001. pp.323.
- Shah, Anup. (2011). Energy Security. [Online]. Tersedia dalam: <http://www.globalissues.org/article/595/energy-security>.
- Vogl, Andreas. (n.d.). Democratization in Saudi Arabian. [Online]. Tersedia dalam: https://www.academia.edu/7238910/Democratization_in_Saudi_Arabia.